PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT KERJA : **BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERMANTA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **241833**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.158.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.570.000.000
2. Tanah Seluas 689 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 53.500.000
3. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 49.500.000
4. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000
5. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.005.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 798.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B3M MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, ISUZU DOUBLE CABIN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

4. MOBIL, ISUZU TRAGA PICK UP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	**Rp.**	**96.000.000**
D. SURAT BERHARGA	**Rp.**	**661.040.000**
E. KAS DAN SETARA KAS	**Rp.**	**473.129.491**
F. HARTA LAINNYA	**Rp.**	**----**
Sub Total	**Rp.**	**7.186.669.491**
III. HUTANG	**Rp.**	**19.200.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**7.167.469.491**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.